UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Pembuktian Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Iktikad Baik Pada Perkara Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Hidup
Agung Prabowo, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adinugroho, Wahyu Catur, *et al*, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetlands International – Indonesia Programme, 2005.

Ali, Achmad, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Aries, Albert, *Hukum Pembuktian, Teori, Asas, dan Yurisprudensi (dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN dan Konstitusi,* Depok: Rajawali Pers, 2022.

Coleman, Jules L., *Risks and Wrongs*, Cambridge University Press, 1992.

Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Nomatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Dimyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, *Metode Penelitian Hukum,* Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2004.

Djodjodirdjo, Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita,1982.

Fajar, Mukti dan Akhmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hiarej, Eddy O.S., Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2012.

Husin, Sukanda, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Keraf A. Sonny, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2006.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama*), Yogyakarta : FH UII Press, 2013.

Lotulung, Paulus Effendie, Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Kolopaking, Anita D.A., *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Bandung: P.T. Alumni, Bandung, 2013.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Pembuktian Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Iktikad Baik Pada Perkara Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Hidup
Agung Prabowo, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Mertokusumo, Sudikno, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni,1982.

P. L. Wery, P. L., *Perkembangan Hukum Tentang Iktikad Baik Di Nederland,* Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perdata,* (Bandung: Sumur, Bandung, 1992.

Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan,* Depok: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Santosa, Mas Achmad, *Perkembangan Hukum Standing Dalam Gugatan Lingkungan,* Jakarta: Indonesia Center For Enviromental Law, 1995.

Setiawan, Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni,1982.

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan,* Jakarta: Erlangga, 2004.

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Edisi Revisi*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Soekanto, Soerjono & Mamudja, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Subekti, *Hukum Pembuktian,* Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Syahrin, Alvi Syahrin, et al, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Wibisana, Andri Gunawan, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata,* Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Wijoyo, Suparto, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*, Cet. I., Surabaya: Airlangga University Press, 2005

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Pembuktian Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Iktikad Baik Pada Perkara Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Hidup
Agung Prabowo, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Jurnal

Anita Afriana dan Fakhriah, Efa Laela,"Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia" *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2, No. 2, (2016): 280.

Karimullah, Muhammad dan Permana, Yana Sukma, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Korporasi dalam Perspektif UU PPLH dan Prinsip *Strict Liability*", *Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum,* Vol. 2 No. 2 (2025): 20.

Khairandy, Ridwan, "Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolak Ukur Obyektif", *Jurnal Hukum.* No.3. Vol 14 (Juli 2008): 348.

Kusumantari, Made Nikita Novia Kusumantari dan Udiana, Made "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.*2 (2018): 4.

Machmud, Syahrul,"Konsep *Strict Liability* Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara,* Vol. 7 No. 1 (2017): 44.

Maulana, Jalu Akbar dan Annisa, F.N. "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja" *Amnesti Jurnal Hukum,* Vol. 6, No. 2 (2024): 302.

Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmu Hukum* (2014), 93.

Nuradi dan Rohaedi, Edi, "Implementation of Strict Liability Principle in Civil Law Enforcement in Environment Law files as Consequence of Forest and Land Fire in Indonesia Justice Practice", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding,* Vol.7, No.5 (2020): 483.

Sodikin,"Perkembangan Konsep *Strict Liability* Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi" *Al-Qisth Law Review,* Vol. 5 No. 2 (2022): 264.

Teguh, Pri Pambudi, "Putusan Sela Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Analisis Atas Fungsi Dan Kepastian Hukum", Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, Vol.2, Issue 1 (2026): 36.

Oyaldi Puhi, et al "Urgensi Beracara di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," Pleno Jure, Vol. 10, No. 1 (2021): 4-6.

Wibisana, Andri. G, "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/ Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Pembuktian Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Iktikad Baik Pada Perkara Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Hidup
Agung Prabowo, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Vs PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)", *Bina Hukum Lingkungan, Vo. 1, No.1,* (Oktober, 2016): 42-43.

Wongkar, Etheldreda ELT, "Meninjau Kembali *Strict Liability*: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Pro Natura*, Vol.1, No.1, (2024): 3.

C. Tesis

Kartilantika, Ambar, "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Gugatan Ganti Rugi Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan" (*Tesis* pada Program Studi Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, 2019).

Nurmajdia, Risnanda, "Beban Pembuktian Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak) Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan (Fairness)", (*Tesis* Program Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 2022).

Ritonga, Muhsyi Alim, "Penerapan Asas Strict Liability Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu", (*Tesis* Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2023).

D. Makalah

Armawan, *"Penerapan Prinsip Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Dengan Pembagian Beban Pembuktian Melalui Putusan Sela",* Paper Tugas Magang III Asisten Hakim, Program Pendidikan Calon Hakim Pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Jenie, Siti Ismijati, *"Iktikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia,"* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta.

E. Internet

Arumingtyas, Lusiana, Lahan Sawit Terbakar Hakim Putuskan Bayar Rp261 Miliar, Perusahaan di Kalteng Ini Bermasalah Sejak Lama, Mongabay.co.id, tanggal 26 Oktober 2019, https://mongabay.co.id/2019/10/26/lahan-sawit-terbakar-hakim-putuskan-bayar-rp261-miliar-perusahaan-di-kalteng-ini-bermasalah-sejak-lama, diakses 27 Juli 2026.

American Law Insititute, Restatement (Second) of Tort 519 (1977) comment on subsection (1) d. pada https://www.criminallawweb.net/web1/MPC/torts/torts519.htm, diakses 1 Juni 2026.

Armawan, "Penerapan Prinsip Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Dengan Pembagian Beban Pembuktian Melalui Putusan Sela", Paper Tugas Magang III Asisten Hakim, Program Pendidikan Calon Hakim Pada Pengadilan Negeri Tulungagung, pada https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/penerapan-prinsip-

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Pembuktian Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Iktikad Baik Pada Perkara Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Hidup
Agung Prabowo, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

hukum-pembuktian-dalam-perkara-perdata-dengan-pembagian-beban-pembuktian-melalui-putusan-sela/detail diakses pada 20 Mei 2026.

Bissett, Norman, et al., "Indonesia: Omnibus Law – Impacts on Environment and Forestry," Global Compliance News, by Baker McKenzie, pada:https://www.globalcompliancenews.com/2020/11/14/indonesia-omnibus-law-impacts-on-environment-and-forestry-12102020/ diakses pada 20 Juli 2026.

HUMASPMK, Kebakaran Lahan Masih Terjadi di Kalteng dan Sumsel, arsip.kemenkopmk.go.id, 3 Oktober 2014, pada https://arsip.kemenkopmk.go.id/artikel/kebakaran-lahan-masih-terjadi-di-kalteng-dan-sumsel, diakses 27 Juni 2026.

F. Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* /BW) Staatsblad No. 23 Tahun 1847).

Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*/HIR).

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*/RBg).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3215).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Pembuktian Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Iktikad Baik Pada Perkara Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Hidup
Agung Prabowo, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup AkibatPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453).

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: 2009.

G. Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Plk, Perihal Gugatan KLHK terhadap PT Arjuna Utama Sawit, 29 Mei 2018.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Pembuktian Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Iktikad Baik Pada Perkara Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Hidup
Agung Prabowo, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Plk, Perihal Gugatan KLHK terhada[PT Arjuna Utama Sawit, 23 Oktober 2019.

Putusan Pengadlan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PDT.G-LH/2019/PT.PLK, Perihal Gugatan Tingkat Banding KLHK terhadap PT Arjuna Utama Sawit, 22 Januari 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3220 K/Pdt/2020, Perihal Gugatan tingkat Kasasi KLH terhadap PT Arjuna Utama Sawit, 10 Desember 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 PK/Pdt/2022, Perihal Peninjauan Kembali Gugatan KLHK terhadap PT Arjuna Utama Sawit, 28 Juli 2022.